



# Governance Brief

## Agroforest karet di Jambi: dapatkah bertahan di era desentralisasi?

Aula Sakinah Muntasyarah

*Agroforest karet merupakan suatu model pengelolaan sumber daya alam khas yang dilakukan oleh masyarakat Bungo antara lain di Desa Lubuk Beringin. Pengelolaan kebun karet dengan sistem agroforestry yang ramah lingkungan ini dilakukan masyarakat sejak awal abad 20 dan mampu memenuhi hampir semua kebutuhan masyarakat. Dapatkah pengelolaan sumber daya alam ini terus bertahan di tengah semakin besarnya tuntutan para pihak (masyarakat, pihak swasta maupun pemda) akan sumber daya alam untuk pemenuhan kehidupan yang layak.*

Seperti banyak masyarakat lainnya di kabupaten Bungo, masyarakat Lubuk Beringin menggantungkan hidupnya pada kebun karet, dimana sekitar 80% kebutuhan hidup masyarakat dipenuhi dari kebun karet (*agroforest* karet). Masyarakat memadukan tanaman karet dengan tanaman keras lainnya di dalam kebun karet, sehingga hampir semua kebutuhan hidup mereka diperoleh dari kebun karet tersebut; uang, buah-buahan, kayu bakar, kayu untuk bangunan, hewan, dan palawija (hasil dari *behumo* yaitu pada waktu proses pembukaan lahan).

Penelitian, khususnya penelitian yang dilakukan oleh World Agroforestry Centre, membuktikan bahwa keanekaragaman flora di kebun karet cukup tinggi, terutama pada lapisan bawah. Hal ini berbeda dengan kebun karet monokultur yang banyak dilakukan masyarakat di daerah dekat kota Muara Bungo. Keanekaragaman flora yang tinggi ini sebenarnya merupakan nilai tambah kebun karet yang penting untuk masyarakat dan lingkungan.

Keanekaragaman tanaman ini sengaja dibangun masyarakat untuk menambah pemasukan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Masyarakat tidak hanya mendapatkan uang dari hasil *memotong para/menyadap* karet, tetapi juga hasil lain seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Selain nilai tambah untuk masyarakat, *agroforest* karet juga memberikan pelayanan lingkungan. Cukup banyak fauna yang hidup di dalam kebun karet, antara lain jenis mamalia seperti babi hutan, simpai, ungko, dan rusa. *Agroforest* karet juga dapat dikatakan sebagai salah satu cara untuk mengkonservasi tanaman-tanaman non komersil yang berasal dari hutan alam yang sudah mulai menghilang di Kabupaten Bungo atau Propinsi Jambi secara umum, seperti gaharu (*Aquilaria malaccensis*).

### Kebun Karet Hasil Interaksi Simbolik Masyarakat

Manusia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sedangkan perilaku manusia dalam bertindak dipengaruhi oleh objek fisik dan objek sosial di sekeliling mereka (Mulyana, 2002). Hal ini terlihat jelas dalam perkembangan *agroforest* karet di Kabupaten Bungo.

*Agroforest* karet merupakan hasil interaksi selama bertahun-tahun antara masyarakat Bungo dengan sumber daya alam di sekitar mereka. Dahulunya orang-orang tua masyarakat Lubuk Beringin mempraktekkan perladangan berpindah. Kemudian mereka beralih pada kegiatan mendulang emas di sungai-sungai. Baru pada sekitar awal abad ke-20, masyarakat diperkenalkan dengan tanaman karet oleh para pedagang dari Malaysia.

Harga getah karet yang cukup tinggi mendorong Masyarakat Lubuk Beringin dan sekitarnya bercocok tanam karet. Pola budidaya karet yang mereka lakukan adalah dengan menanam karet di antara tanaman kehutanan lainnya di lahan hutan alam yang mereka buka. Pola ini banyak dipraktekkan masyarakat Bungo pada waktu itu.



Getah karet yang siap untuk dilelang di pasar lelang karet di Kecamatan Muko Muko Bathin VII (Foto oleh Aula Sakinah Muntasyarah)

Interaksi masyarakat Lubuk Beringin dengan *agroforest* karet cukup tinggi. Ini dapat dilihat dari tingginya penggunaan *agroforest* karet, dimana masyarakat biasanya memasuki *agroforest* karet rata-rata 4-5 kali dalam satu minggu (85% responden). Interaksi masyarakat dengan *agroforest* karet juga dapat dilihat dari arti kebun karet bagi masyarakat. Bagi mereka kebun karet adalah sumber ekonomi yang penting (lihat referensi).

Di dalam pengelolaan *agroforest* karet tidak hanya laki-laki yang berperan, perempuan juga memiliki peran yang cukup penting. Perempuan terutama sangat berperan dalam memungut buah-buahan, kayu bakar, dan hasil panen dari *behumo* (perladangan ketika akan membuka lahan baru untuk dijadikan kebun karet) seperti cabai, padi ladang, dan hasil pertanian lainnya.

Di samping bekerja sebagai pencari nafkah di dalam kebun karet, seorang perempuan/istri (dengan status janda atau suaminya merantau) juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kemudahan dalam pengelolaan *agroforest* karet ini memungkinkan perempuan untuk tetap dapat mengerjakan pekerjaan domestik. Pengelolaan *agroforest* karet memang tidak menuntut perawatan yang rumit dan mahal, seperti perawatan di dalam kebun karet monokultur yang memerlukan pemupukan dan pembersihan lahan yang cukup intensif.

### **Agroforest Karet vs Kebun Karet Monokultur?**

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan, dan didorong semakin pesatnya arus informasi dan teknologi, *agroforest*

karet mulai tergantikan dengan kebun karet monokultur. *Agroforest* karet saat ini lebih sering ditemui di desa-desa yang letaknya jauh dari Ibu Kota Kabupaten Bungo, Muara Bungo, seperti Desa Lubuk Beringin. Ini dimungkinkan karena desa-desa yang terpencil memiliki akses yang rendah terhadap informasi dan teknologi baru. Perbedaan kebutuhan dan kemampuan masyarakat di desa terpencil juga dapat mempengaruhi perubahan pola ini.

Hal ini ditambah lagi dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan getah karet di pasaran. Karet merupakan salah satu produk ekspor yang diunggulkan Propinsi Jambi, sehingga tidak mengherankan jika pemerintah daerah juga berusaha untuk meningkatkan produksi getah karet. Kebun karet monokultur dianggap dapat menjawab kebutuhan ini. Jika dilihat dari kuantitas getah karet yang dihasilkan, kebun karet monokultur mampu memberikan hasil getah karet yang lebih banyak bila dibandingkan dengan *agroforest* karet. Maka tak mengherankan masyarakat dan pemerintah (khususnya sub dinas terkait) lebih memilih kebun karet monokultur.

*Agroforest* karet memiliki keunggulan tersendiri, selain keanekaragaman hasil dan kemampuan untuk mengkonservasi flora dan beberapa fauna yang telah disebutkan sebelumnya. Keanekaragaman hasil dari *agroforest* karet dapat menjadi masukan untuk daerah. Dengan semakin berkurangnya kayu yang dapat dihasilkan dari hutan alam, pemerintah daerah dapat menjadikan *agroforest* karet sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan akan kayu. Selain itu dengan pengelolaan *agroforestry* karet ini, masyarakat dan pemda mampu menyediakan getah karet yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam yang lestari.

**Tabel 1.** Perbandingan *agroforest* karet dengan kebun karet monokultur

	Agroforest karet	Kebun karet monokultur
Kemampuan menjaga hara	√	Kurang mampu
Fungsi konservasi tanah dan air	√	Kurang mampu
Fungsi konservasi flora fauna	√	Tidak mampu
Produksi getah karet	Lebih sedikit (<500 pohon/ha, pada usia <40th)*	Lebih banyak
Keberagaman hasil	Banyak	Hanya satu jenis
Kemudahan perawatan	Sangat mudah dan murah	Lebih sulit dan lebih mahal

\* Sumber: De Foresta dkk, 2000, *Agroforest Khas Indonesia*, ICRAF. Bogor

Bagi lingkungan, pengelolaan dengan sistem *agroforest* mampu memberikan pelayanan konservasi tanah dan air. Kebun karet yang dikelola dengan sistem *agroforest* mampu menjaga ketersediaan hara tanah dan air melalui peran dari sistem perakaran tanaman kehutanan.

### Minimnya Dukungan

Pengelolaan kebun karet yang dilakukan masyarakat Lubuk Beringin bisa dikatakan belum memperoleh perhatian pihak pemerintah daerah. Menurut masyarakat, penyuluhan tentang pengelolaan kebun karet dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan belum sampai ke masyarakat.

Masyarakat pernah mencoba menanam bibit karet unggul untuk meningkatkan hasil, akan tetapi karena kurangnya pengetahuan mengenai bibit karet unggul dan budi dayanya, hal ini malah merugikan petani. Menurut masyarakat Lubuk Beringin, selama ini mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan dan penyuluhan mengenai pengelolaan kebun karet yang efektif dan efisien dari dinas terkait, apalagi penyuluhan atau pelatihan dalam mengelola kebun karet dengan menggunakan bibit unggul. Padahal dengan seringnya pelatihan dan penyuluhan dari dinas terkait, dapat membangun komunikasi dan hubungan yang baik antara masyarakat dengan pemerintah setempat, terutama dengan dinas kehutanan dan perkebunan.

Jika dilihat, pelayanan lingkungan yang telah diberikan masyarakat Lubuk Beringin cukup besar. Areal Desa Lubuk Beringin mencakup hutan lindung yang letaknya dekat dengan Taman Nasional Kerinci Seblat. Dikarenakan luasnya kebun karet tradisional milik masyarakat, hutan lindung yang berada di kawasan ini masih cukup terjaga. Masyarakat telah meninggalkan kegiatan *berbalok* sejak tahun 2000 karena merasakan aktivitas mengelola kebun karet tua mereka lebih menguntungkan. Adanya LSM Warsi dan aktivitas yang dilakukan pada program *Integrated Conservation and Development Program* (ICDP), sedikit banyak telah membantu membangun kembali kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan lindung.

Memang masih dapat dilihat ada beberapa masyarakat Desa Lubuk Beringin dan masyarakat luar

yang membuka kebun karet di hutan lindung. Hal ini dikarenakan kurangnya penjagaan kawasan hutan lindung oleh dinas terkait dan kurangnya sosialisasi tata batas hutan lindung. Dalam pemasangan tapal batas hutan lindung dinas terkait (dinas kehutanan pada tahun 1990an awal) tidak mengikutsertakan masyarakat Lubuk Beringin, sehingga banyak kebun karet masyarakat termasuk dalam kawasan hutan lindung.

### Kesimpulan dan Rekomendasi

*Agroforest* karet merupakan salah satu model pengelolaan sumber daya hutan yang khas masyarakat Bungo. *Agroforest* karet menawarkan kelenturan pendapatan kepada masyarakat sekaligus memenuhi fungsi konservasi. Pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan masyarakat Lubuk Beringin khususnya dan Kabupaten Bungo pada umumnya, merupakan salah satu contoh



Keanekaragaman pada lapisan bawah dari dalam kebun karet (Foto oleh Aula Sakinah Muntasyarah)

dari pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau *community forestry*.

Kemudahan dalam merawat dan memelihara *agroforest* karet mengakomodir peran perempuan yang cukup besar dalam pemeliharaannya. Dalam keseharian, seorang perempuan selain mengurus pekerjaan domestik/rumah tangga juga masih dapat memungut hasil dan merawat kebun karet milik mereka. Dalam pengelolaan *agroforest* karet, perempuan –terutama seorang janda atau perempuan yang ditinggal merantau oleh suaminya– memiliki peran dan akses yang sama dengan laki-laki. Apalagi budaya matrilinear yang dianut masyarakat Lubuk Beringin menempatkan perempuan sebagai pewaris dari harta berat seperti kebun karet.

Pengelolaan *agroforest* karet sudah sepatasnya mendapatkan perhatian dan tanggapan yang positif dari pemerintah Kabupaten Bungo, khususnya dinas kehutanan dan perkebunan. Sangat diperlukan bantuan, terutama pelatihan (contohnya pembibitan karet) dan penyuluhan, kepada masyarakat secara menyeluruh agar pengelolaan *agroforest* karet tetap mampu mendukung kehidupan masyarakat tanpa meninggalkan kepentingan lingkungan. Sangat dibutuhkan adanya kebijakan pemerintah daerah dalam menjamin keberlangsungan *agroforest* karet, seperti tetap tersedianya pasar untuk memasarkan hasil dari kebun karet tradisional milik masyarakat ini.

Di era desentralisasi, dimana setiap pemerintah daerah memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengelola sumber daya alamnya, pengelolaan sumber daya alam yang khas suatu daerah ini sudah sepatasnya mendapatkan dukungan dan perhatian yang besar dari pemerintah setempat.

## Publikasi terkait

- Gunawan, H. 2005. Desentralisasi: ancaman dan harapan bagi masyarakat adat - studi kasus masyarakat adat Cerekang di Kabupaten Luwu Timur, propinsi Sulawesi Selatan. Bogor, Indonesia, CIFOR. Forests and Governance Programme Series. v, 24p.
- Lestiawati, Y. 2005. Kehutanan daerah di era desentralisasi penghambat koordinasi?. CIFOR Governance Brief No. 5. 4p.
- Sumartlan. 2005. Kupu-kupu sayap burung musnah, masyarakat pegunungan Arfak menderita. CIFOR Governance Brief No. 6. 2p.
- Sukardi. 2005. Mencari benang merah kelangsungan hutan adat ongkoe di Kabupaten Barru. CIFOR Governance Brief No. 7. 2p.
- Gunawan, H. 2005. Implementasi desentralisasi salah masyarakat adat menuai masalah. CIFOR Governance Brief No. 8. 4p.
- Yulianti, A. 2005. Kopermas: masyarakat hukum adat sebagai tameng bagi pihak yang berkepentingan. Bogor, Indonesia, CIFOR. CIFOR Governance Brief No. 9. 4p.
- Yusran. 2005. Mengembalikan kejayaan hutan kemiri rakyat. Bogor, Indonesia, CIFOR. CIFOR Governance Brief No. 10. 4p.
- Angi, E.M. 2005. Bagaimana kebijakan dapat dikoordinasikan antara pusat, daerah dan masyarakat?. Bogor, Indonesia, CIFOR. CIFOR Governance Brief No. 11. 4p.
- Affandi, O. 2005. Dampak Kebijakan IPPK dan IUPHHK Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Malinau. Bogor, Indonesia, CIFOR. CIFOR Governance Brief No. 12. 6p.
- Wiati, C.B. 2005. Apakah Setelah Desentralisasi Hutan Penelitian Lebih Bermanfaat Untuk Masyarakat Lokal?. Bogor, Indonesia, CIFOR. CIFOR Governance Brief No. 13. 4p.
- Agusnawati 2006. Peran kaum perempuan dalam pengambilan keputusan pada masyarakat pengelola hutan kemiri di Mario Pulana. CIFOR Governance Brief No.28. 4p.

Governance brief ini ditulis dalam rangka partisipasi penulis dalam program "Building Leadership for Forest Reforms of the Future" yang diselenggarakan atas kerja sama CIFOR dan Ford Foundation Jakarta dan merupakan ringkasan tesis Program S1, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Agroforest Karet Sebagai Alternatif Pengelolaan Sumber Daya Hutan Yang Lestari" (Studi Kasus di Desa Lubuk Beringin, Kec. Rantau Pandan, Kab. Bungo, Jambi), Informasi Tesis dapat dilihat di CIFOR website: <http://www.cifor.cgiar.org/scripts/newscripts/publications/detail.asp?pid=2016>



Center for International Forestry Research, CIFOR  
Alamat kantor: Jalan CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang  
Bogor Barat 16680, Indonesia.  
Alamat surat: P.O. Box. 6596 JKPWB, Jakarta 10065  
Indonesia

Tel: +62(251) 622 622 Fax: +62(251) 622 100  
E-mail: [cifor@cgiar.org](mailto:cifor@cgiar.org)  
Website: [www.cifor.cgiar.org](http://www.cifor.cgiar.org)

Foto sampul dan isi oleh Aula Sakinah Muntasyarah

Program *Forests and Governance* di CIFOR mengkaji cara pengambilan dan pelaksanaan keputusan berkenaan dengan hutan dan masyarakat yang hidupnya bergantung dari hutan. Tujuannya adalah meningkatkan peran serta dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang kurang berdaya, meningkatkan tanggung jawab dan transparansi pembuat keputusan dan kelompok yang lebih berdaya dan mendukung proses-proses yang demokratis dan inklusif yang meningkatkan keterwakilan dan pengambilan keputusan yang adil di antara semua pihak.